

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model evaluasi CIPP terhadap kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini menarik dua simpulan utama yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pertama, evaluasi terhadap empat komponen CIPP menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PUG di DKI Jakarta telah mencapai kematangan pada level regulatif dan institusional, namun masih menghadapi kesenjangan pada level substantif. Pada dimensi konteks, kebijakan PUG bertumpu pada legitimasi normatif yang kuat, mulai dari Pergub No. 37 Tahun 2012, RPJMD, hingga mekanisme PPRG wajib bagi seluruh OPD, namun belum dilengkapi Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagai dokumen operasional yang disyaratkan KemenPPPA, dan sebagian aparatur masih memahami PUG secara sempit sebagai kegiatan administratif. Pada dimensi input, sumber daya fiskal dan kelembagaan dinilai memadai, tetapi unit koordinator teknis PUG hanya terdiri dari tiga staf untuk mengawasi seluruh OPD, dan kemandirian kapasitas analitis OPD belum terbentuk, tercermin dari ketergantungan pada pihak ketiga dalam penyusunan analisis GAP. Pada dimensi proses, seluruh OPD secara formal telah mengikuti prosedur PPRG dan koordinasi Pokja, namun terdapat kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan komitmen substantif, di mana sebagian dokumen gender hanya disusun untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa dijadikan landasan perumusan program.

Pada dimensi produk, capaian makro seperti tren perbaikan IPG dan IDG serta realisasi 98% OPD yang melaksanakan PUG menunjukkan keberhasilan sistem, meskipun capaian indikator tersebut tidak serta-merta mencerminkan kualitas analisis gender di tingkat program karena dipengaruhi faktor eksternal.

Kedua, penelitian ini mengidentifikasi enam faktor penentu keberhasilan yang berpotensi menjadi praktik terbaik (*best practice*) untuk direplikasi daerah lain. (1) Sumber daya fiskal dan kelembagaan yang kuat meskipun tantangan kini bergeser dari kuantitas menuju kualitas pemanfaatan. (2) Komitmen politik yang terinstitusionalisasi dalam dokumen perencanaan dan mekanisme koordinasi formal, sehingga tidak bergantung pada figur personal. (3) Keterlibatan aktif LSM dan pemangku kepentingan eksternal yang memperkuat relevansi dan jangkauan kebijakan di luar kapasitas birokrasi. (4) Kesesuaian desain program dengan kebutuhan konteks urban Jakarta yang dinamis. (5) Integrasi PUG ke dalam sistem kerja rutin birokrasi, meskipun konsistensinya masih rentan terhadap rotasi personel. (6) Mekanisme monitoring dan evaluasi yang difungsikan bukan sekadar pelaporan, melainkan sebagai instrumen pembelajaran organisasi.

Secara keseluruhan, DKI Jakarta menghadapi tantangan yang berbeda dari daerah lain, bukan lagi pada tahap membangun fondasi kebijakan, melainkan pada bagaimana kematangan struktural yang sudah dicapai dapat bertransformasi menjadi internalisasi nilai gender yang merata dan konsisten dalam seluruh praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menyampaikan sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi DKI Jakarta, serta bagi pengembangan penelitian di bidang ini ke depannya.

4.2.1 Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG yang telah diinisiasi pada awal 2025. RAD merupakan dokumen operasional yang memuat langkah konkret, target terukur, dan pembagian tanggung jawab antar-OPD. Tanpa RAD, pelaksanaan PUG berisiko terus berjalan berdasarkan rutinitas tanpa arah kebijakan yang dapat dievaluasi secara periodik.

Kedua, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang tegas terkait kualitas implementasi PPRG. Kewajiban menyusun GAP dan GBS belum sepenuhnya disertai konsekuensi yang mendorong peningkatan kualitas. Penghargaan bagi OPD yang mengimplementasikan PUG secara substantif dan catatan evaluasi bagi yang hanya memenuhi formalitas akan mendorong terbentuknya budaya kepatuhan yang lebih bermakna.

4.2.2 Bagi Pokja PUG (Dinas PPPAP)

Pertama, Dinas PPAPP perlu mengusulkan penguatan kapasitas SDM internal Subkelompok PUG kepada pimpinan. Unit yang menjadi motor koordinasi teknis PUG seluruh provinsi ini saat ini hanya terdiri dari tiga orang staf —

hambatan struktural nyata yang membatasi kualitas pendampingan kepada ratusan OPD.

Kedua, Pokja PUG disarankan mengembangkan standar minimum kualitas dokumen analisis gender yang berlaku seragam bagi seluruh OPD. Standar ini perlu mencakup ketajaman identifikasi kesenjangan gender, keterukuran target, dan relevansi antara analisis dengan program — bukan sekadar penilaian apakah dokumen terpenuhi atau tidak.

Ketiga, Dinas PPAPP perlu mendokumentasikan secara sistematis seluruh mekanisme koordinasi, modul bimtek, dan pembelajaran dari pelaksanaan PUG sebagai *knowledge base* yang dapat diakses oleh OPD lain maupun daerah lain yang ingin mengadopsi praktik terbaik DKI Jakarta.

4.2.3 Bagi Focal Point di OPD/SKPD Lain

Focal Point PUG disarankan untuk tidak sekadar berperan sebagai penanggung jawab administratif dokumen PPRG, tetapi juga sebagai agen perubahan internal yang aktif mendorong internalisasi perspektif gender dalam seluruh siklus perencanaan di unit kerjanya. Focal Point perlu lebih aktif memanfaatkan data terpilah sebagai dasar perumusan program, bukan hanya sebagai lampiran kelengkapan dokumen.

4.2.4 Bagi Daerah Lain yang Ingin Mereplikasi Praktik Terbaik DKI Jakarta

Daerah lain yang ingin mengadopsi praktik terbaik DKI Jakarta disarankan untuk memulai dari tiga hal yang paling mendasar dan langsung dapat dilakukan: (1) memastikan komitmen pimpinan daerah terinstitusionalisasi dalam dokumen

perencanaan formal seperti RPJMD dan Renstra OPD sehingga tidak bergantung pada figur personal; (2) membentuk mekanisme koordinasi lintas OPD seperti Pokja PUG dan Focal Point sejak awal sebagai tulang punggung kelembagaan; dan (3) mengembangkan sistem monitoring yang tidak hanya berbasis pelaporan, melainkan mendorong siklus umpan balik nyata antara evaluasi dan perbaikan program.

4.2.5 Bagi Penelitian Selanjutnya

Pertama, penelitian ini hanya mencakup satu provinsi dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang relatif tinggi. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki kapasitas berbeda untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor kontekstual keberhasilan PUG.

Kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas perspektif dengan menyertakan suara kelompok sasaran: perempuan, anak, dan kelompok rentan yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Perspektif penerima manfaat akan memberikan dimensi evaluasi yang lebih holistik mengenai dampak substantif kebijakan.